

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**



**DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2023**

## PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik. LKjIP Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai hasil analisis pengukuran kinerja.

LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indicator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kinerja serta membawa pemahaman dan pengetahuan kita semua.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN



**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630510 199011 1 001

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI .....</b>	<b>1</b>
<b>C. SUMBER DAYA ORGANISASI .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA.....</b>	<b>9</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023.....</b>	<b>9</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>14</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>21</b>
<b>B. UPAYA PERBAIKAN .....</b>	<b>21</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui SAKIP.

Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkannya, seluruh komponen pemerintah Kabupaten Magetan yaitu satuan kerja – satuan kerja perangkat daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

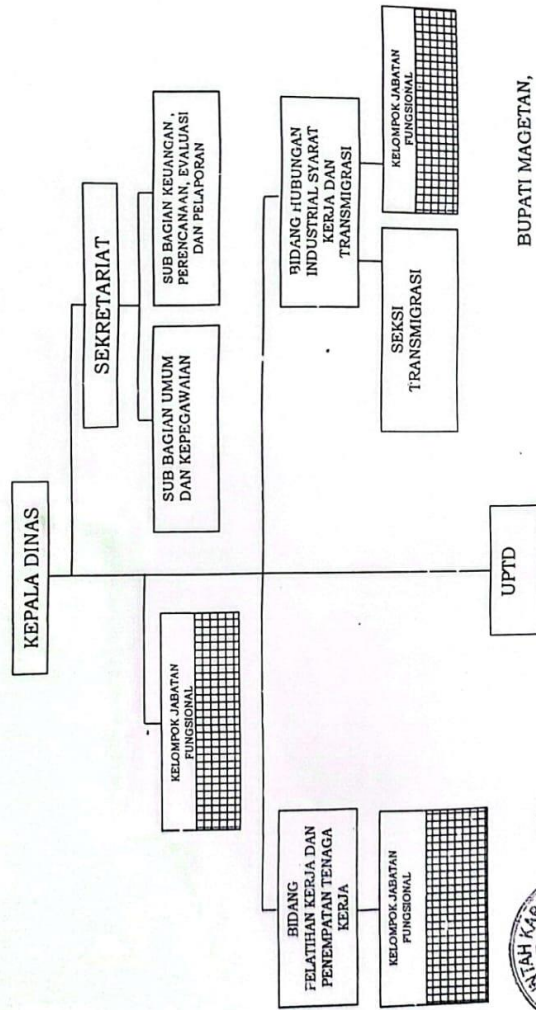
Penyusunan LkjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun mendatang.

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 89 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



Setelah selesai dengan aslinya  
PEMANTAH KABUPATEN  
KEPALA DAERAH HUKUM  
PEMANTAH KABUPATEN  
MAGETAN  
TAKA RISDIANTO, S.H., M.Si  
4 Pelembagaan Direktorat I  
NIP. 19740306 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang ada didalam struktur organisasi PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas*

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sekretariat*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing – masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat - menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat –menyurat ;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor;

- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat dan pensiun;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan (Renja);
- c. Mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengolah bahan untuk menyusun Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (SIRUP);
- d. Menyiapkan data untuk menyusun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- e. Mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas;
- g. Menghimpun, mengoordinasikan, dan mengelola dokumen perjanjian kinerja (PK);
- h. Mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP), dan Survei Kepuasan Masyarakat ;
- i. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- k. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- n. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- o. Menyusun laporan keuangan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

3. *Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja*

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pelatihan berbasis kompetensi, analisis produktivitas, penempatan kerja dan pengembangan perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
  - b. Pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - c. Pelaksanaan pemimpinan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - d. Pelaksanaan rekomendasi operasional, perpanjangan dan penambahan program kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
  - g. Pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat Kab/Kota;
  - h. Pelaksanaan koordinasi pemantauan (Surveillance) tingkat produktivitas;
  - i. Pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - j. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - k. Pelaksanaan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - l. Pelaksanaan pemberian rekomendasi operasional kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - m. Pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja diluar negeri kepada masyarakat;
  - n. Pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon PMI;
  - o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan PMI ke luar negeri;
  - p. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
  - q. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan PMI Pra dan Purna penempatan;
  - r. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan PMI;
  - s. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan PMI Purna;
  - t. Pelaksanaan tugas penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) wilayah dalam daerah dan
  - u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
4. *Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi (Hubinsyakertrans)*
- Bidang Hubinsyakertrans mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta merumuskan dan melaksanakan perpindahan dan



penempatan transmigrasi, pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi.

Adapun fungsi dari bidang Hubinsyakertrans adalah :

- a. Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan verifikasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup Kabupaten/Kota;
- c. Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
- f. Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan diperusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan motivasi ketransmigrasian;
- h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perpindahan dan penempatan transmigrasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Hubinsyakertrans dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Didalam bidang Hubinsyakertrans terdiri dari 1 (satu) seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubinsyakertrans. Adapun seksi di bawah bidang hubinsyakertrans sebagai berikut :

4.1. *Seksi Transmigrasi* mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pendataan animo calon transmigran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal dan daerah tujuan;
- d. Menyiapkan bahan klarifikasi lokasi permukiman daerah tujuan transmigrasi;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pendampingan calon transmigran yang terseleksi;
- f. Menyiapkan segala hal yang terkait dengan proses pemeragkatan transmigrasi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. Melaksanakan pendampingan dan pengawalan transmigran kedaerah tujuan;
- i. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigrasi;
- j. Menyiapkan bahan pendataan permasalahan ketransmigrasian;
- k. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan ketransmigrasian;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pasca penempatan transmigrasi;

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ketransmigrasian; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**C. SUMBER DAYA ORGANISASI**

**C.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan, berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Data pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

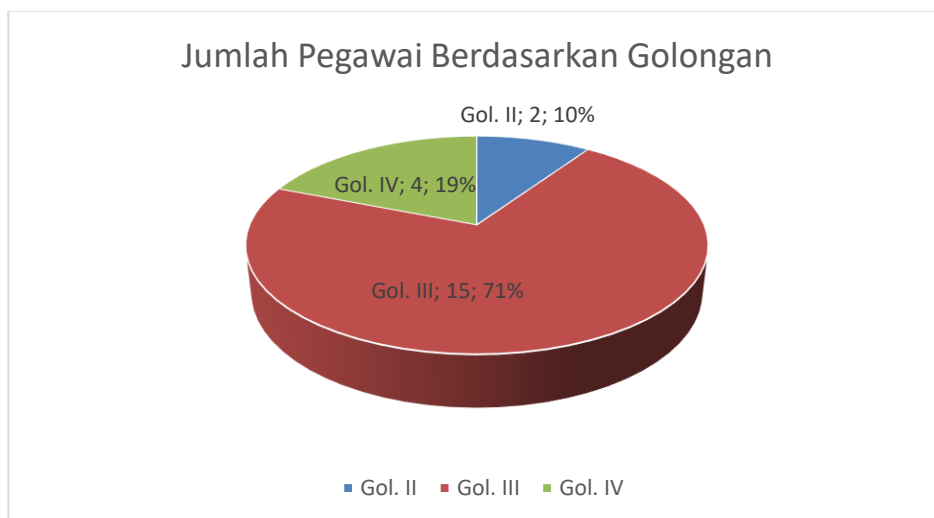
**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMP	1
2	D3	5
3	S1	13
4	S2	2
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Magetan

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sebagian besar atau sebesar 71,43% memiliki minimal ijazah S1, potensi SDM yang cukup baik untuk mewujudkan Kabupaten Magetan yang lebih baik.

Sedangkan apabila dilihat dari golongan/ kepangkatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Diagram Jumlah Kepegawaian Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai lingkup Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sekitar 90% mempunyai golongan III dan IV. Suatu modal yang cukup bagus untuk Dinas Tenaga Kerja karena didukung oleh SDM yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni.

### C.2. Asset/ Modal

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan telah memiliki Asset/ modal diantaranya Asset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan lain sebagainya. Sampai tahun 2022 total asset yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebanyak Rp. 3.357.565.089,-. Asset yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Asset yang Dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	Tanah	67.000.000
<b>2</b>	Peralatan dan Mesin	1.788.126.266
<b>3</b>	Gedung dan Bangunan	1.387.688.823
<b>4</b>	Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.000.000
<b>5</b>	Aset Tetap Lainnya	4.750.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.357.565.089</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Magetan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023**

##### **1. VISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Magetan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, agar terwujudnya Kabupaten Magetan sebagai Kota Prima dan Berkualitas. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang hendak dicapai adalah:

**“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN  
LEBIH SEJAHTERA”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2019 - 2023 tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

##### **2. MISI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 - 2023**

Berkaitan dengan Misi Kabupaten Magetan, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Misi Kesatu yaitu :

**“Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya  
manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil”.**

Dan Misi Kedua yaitu :

***“Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah”.***

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam mencapai Misi Kesatu ini adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi, dan meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan. Sedangkan Sasaran dalam mencapai Misi Kedua adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis, strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan bimtek perundang-undangan ketenagakerjaan, peningkatan fungsi LKS Tripartit, mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan penetapan upah minimum;
2. Meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian hubungan industrial;
3. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan peningkatan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja;
4. Peningkatan pelayanan ketrasmigrasian melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan pelatihan peningkatan keterampilan calon transmigran;
5. Meningkatkan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja.

### **3. KETERKAITAN SASARAN STRATEGIS RPJMD DENGAN RENSTRA DISNAKER TAHUN 2018 - 2023**

Arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam rangka mewujudkan menurunnya angka kemiskinan dan Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan adalah :

1. Peningkatan Hubungan Industrial dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan agar kondisi hubungan kerja dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku;
2. Pemberian bimtek, penyuluhan serta percepatan penanganan kasus yang didasarkan pada keadilan;
3. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;

4. Memperbesar peluang penempatan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, fasilitasi penetapan calon transmigran dan peningkatan keterampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan;
5. Meningkatkan pelayanan penempatan, kualitas dan perlindungan tenaga kerja
6. Meningkatkan sebaran informasi lowongan dan peluang kerja
7. Optimalisasi pola penempatan AKAL, AKAD, dan AKAN

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan melaksanakan Program Prioritas menurunkan Angka Kemiskinan. Program Penurunan Angka Kemiskinan dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan ketrampilan dan kewirausahaan.

Selanjutnya hubungan antara Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Indikator Kinerja yang dipilih dengan Program Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Misi 1	<b>Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)</b>				
Tujuan 1	Sasaran 1.3				
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan bimtek perundang-undangan ketenagakerjaan, peningkatan fungsi LKS Tripartit, mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan penetapan upah minimum	Peningkatan Hubungan Industrial dengan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan agar kondisi hubungan kerja dapat diciptakan keserasian dan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta peningkatan kesejahteraan pekerja yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku	Disnaker
			Meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian hubungan industrial	Pemberian bimtek, penyuluhan serta percepatan penanganan kasus yang didasarkan pada keadilan	Disnaker
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan peningkatan kompetensi yang	Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan	Disnaker

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	memiliki kompetensi	berbasis kompetensi	sesuai kebutuhan pasar kerja	wirusaha baru yang berdaya saing	
	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Peningkatan pelayanan ketransmigrasian melalui peningkatan kerjasama antar daerah dan pelatihan peningkatan keterampilan calon transmigran	Memperbesar peluang penempatan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, fasilitasi penetapan calon transmigran dan peningkatan keterampilan calon transmigran sesuai lokasi penempatan	Disnaker
Misi 2	<b>Meningkatkan kecepatan penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian hubungan industrial</b>				
Tujuan 3	Sasaran 3.1				
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Meningkatkan fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan pelayanan penempatan, kualitas dan perlindungan tenaga kerja  Meningkatkan sebaran informasi lowongan dan peluang kerja  Optimalisasi pola penempatan AKAL, AKAD, dan AKAN	Disnaker

Adapun Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3) Program Penempatan Tenaga kerja;
- 4) Program Hubungan Industrial;
- 5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Magetan merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tahun 2022 terlihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	100
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	5
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	64
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	Skor	81



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2021. Adapun cara penghitungan capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja dan digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja	KATEGORI
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Kinerja 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 thd 2023 (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	0	5	5	100	50	10
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	62	64	67,46	105,41	65	103,79
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	80,78	81	89,21	110,13	81,5	109,46
<b>Rata - rata</b>						<b>103,1</b>		

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi, dan regulasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing – masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

Indikator yang digunakan untuk mengukur terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) terhadap jumlah kasus yang dicatatkan. Jumlah kasus tercatat pada tahun 2022 sebanyak 1 kasus dan dari kasus yang tercatat tersebut dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Dengan demikian realisasi capaian terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha pada tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaiannya sebesar 100% (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi pada 2022 tercapai 100%.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai target antara lain aktif melakukan pembinaan ke perusahaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial.

## 2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi adalah besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah tenaga kerja yang dilatih terhadap jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2022 sebanyak 93 orang dari 93 orang pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Dengan demikian realisasi capaian dan tingkat capaiannya sebesar 100% (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi pada 2022 tercapai 100%.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai target antara lain melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan disertai dengan uji kompetensi yang bersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sehingga diharapkan lulusan pelatihan dapat bersaing di dunia usaha dan industri.

## 3. Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan

Capaian kinerja urusan transmigrasi diukur dengan indikator kinerja jumlah transmigran yang ditempatkan. Pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja telah melakukan penempatan transmigrasi sebanyak 5 KK sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian realisasi capaian dan tingkat capaiannya sebesar 100% (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5 poin, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi pada 2022 tercapai 10%.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai target antara lain melakukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan alokasi kuota transmigrasi, selain itu melakukan peninjauan ke daerah tujuan transmigrasi

## 4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya penyerapan tenaga kerja adalah besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Perhitungan ini didapatkan dengan cara membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 3.095 orang dan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebanyak 2.088 orang. Dengan demikian realisasi capaian penyerapan tenaga kerja pada

tahun 2022 sebesar 67,46% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 64%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian untuk penyerapan tenaga kerja sebesar 105,41% (**sangat berhasil**). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 5,46 poin persen, sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD maka realisasi pada 2022 tercapai 103,79%.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja untuk mencapai target antara lain meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAL (Antar Kerja Antar Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).

## 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil survei, didapat data sebagai berikut :

### A. Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1)

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai
1	Persyaratan	3,40
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,59
3	Waktu Penyelesaian	3,44
4	Biaya/ Tarif	3,93
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,38
6	Kompetensi Pelaksana	3,61
7	Perilaku Pelaksana	3,54
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,95
9	Sarana dan prasarana	3,44
<b>Rata-rata</b>		<b>3,58</b>

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 adalah 89,61 (Sangat Baik).

### B. Pelayanan Rekomendasi Parpor CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)

NO	UNSUR PELAYANAN	Nilai
1	Persyaratan	3,30
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,74
3	Waktu Penyelesaian	3,30
4	Biaya/ Tarif	3,97
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,24
6	Kompetensi Pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,39
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,97
9	Sarana dan prasarana	3,33
<b>Rata-rata</b>		<b>3,55</b>

Kategori mutu hasil pengukuran SKM Pelayanan Rekomendasi Parpor CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 adalah 88,8 (Baik).

Dari kedua jenis pelayanan tersebut maka didapatkan skor rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 89,21 skor dari target 81 skor. Dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar 110,13%.

## B. REALISASI ANGGARAN

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.439.065.801</b>	<b>2.953.613.679</b>	<b>85,75</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.497.950	61.973.090	97,60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.998.000	19.647.290	98,25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.499.950	42.325.800	97,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.734.637.985	2.294.970.598	83,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.731.637.985	2.291.970.798	83,90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	2.999.800	99,99
Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.328.168	212.239.111	85,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.674.748	6.833.250	89,04
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.622.240	96.112.700	75,91
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.959.400	8.099.350	73,90
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.736.370	14.726.400	99,93
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	14.995.410	14.169.500	94,49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.540.000	3.540.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.800.000	68.757.911	99,94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.156.198	307.189.326	98,41
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.244.898	30.176.876	90,77
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.449.000	13.881.400	96,07
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.462.300	263.131.050	99,50
Pemilihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.445.500	77.241.554	94,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.695.500	33.990.254	97,97

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.150.000	4.491.300	62,82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	29.160.000	97,20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.600.000	9.600.000	100,00
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>82.719.970</b>	<b>75.785.367</b>	<b>91,62</b>
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	82.719.970	75.785.367	91,62
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	82.719.970	75.785.367	91,62
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>1.096.208.757</b>	<b>1.035.646.410</b>	<b>94,48</b>
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	742.333.687	722.605.500	97,34
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	727.333.687	707.610.500	97,29
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	15.000.000	14.995.000	99,97
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	157.248.920	130.183.250	82,79
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	157.248.920	130.183.250	82,79
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.626.150	182.857.660	93,00
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	196.626.150	182.857.660	93,00
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>102.979.825</b>	<b>101.340.910</b>	<b>98,41</b>
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	72.752.675	71.451.410	98,21
Pelayanan Antar Kerja	34.879.425	34.430.160	98,71
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	37.873.250	37.021.250	97,75
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.719.650	9.517.650	97,92
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.719.650	9.517.650	97,92
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	20.507.500	20.371.850	99,34
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.507.500	20.371.850	99,34
<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>113.737.400</b>	<b>109.742.550</b>	<b>96,49</b>

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.077.400	52.077.400	100
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	52.077.400	52.077.400	100
Pengesahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	61.660.000	57.665.150	93,52
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	15.267.550	15.267.550	100
Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.586.450	15.025.450	85,44
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	28.806.000	27.372.150	95,02
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>160.000.000</b>	<b>156.873.864</b>	<b>98,05</b>
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	156.873.864	98,05
Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	156.873.864	98,05
<b>Total</b>	<b>4.994.711.753</b>	<b>4.433.002.780</b>	<b>88,75</b>

Realisasi sebesar 88,75% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan masing – masing bidang dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada bab sebelumnya, persentase rata – rata capaian nilai sasaran organisasi adalah sebesar 103,1%. Sedangkan capaian kinerja keuangan sebesar 88,75%. Dengan capaian kinerja diatas 100% dan realisasi keuangan dibawah 100% maka Dinas Tenaga Kerja telah melakukan efisiensi anggaran dalam mewujudkan tujuannya.

Dengan mendasarkan kepada kesesuaian antara kinerja yang dicapai terhadap kinerja yang direncanakan, hal ini mengindikasikan cukup tinggi tingkat efektifitas kinerja yang dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

### **B. UPAYA PERBAIKAN**

Meskipun pada tahun 2022 indikator sasaran telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan pada tahun mendatang khususnya dalam penanganan pengangguran dan percepatan akses kerja, diantaranya :

1. Melaksanakan job fair, job canvassing, meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja melalui AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAL (Antar Kerja Antar Lokal), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
2. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan disertai dengan uji kompetensi yang bersertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga diharapkan lulusan pelatihan dapat bersaing di dunia usaha dan industry.
3. Melaksanakan pembinaan ke perusahaan untuk mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN



**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196305101990111001



# LAMPIRAN

## Mariks Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
	Program rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indek kepuasan masyarakat    Angka	79	79,5	560.000.000	80	675.000.000							80	1.235.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran    Bulan	12	12	270.000.000	12	350.000.000							24	620.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah    Bulan	12	12	270.000.000	12	300.000.000							24	570.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1.3	Survey Kepuasan masyarakat	jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat    dokumen	1	1	20.000.000	1	25.000.000							2	45.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi    %	100	100	150.000.000	100	220.000.000							100	370.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional    unit	3	14	50.000.000	14	60.000.000							28	110.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor    Paket	2	3	30.000.000	3	60.000.000							6	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		2.1.2.3	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor    Bulan	2	12	20.000.000	12	40.000.000							24	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		2.1.2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor    Paket	2	2	50.000.000	2	60.000.000							4	110.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		3.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan    %	100	100	20.000.000	100	30.000.000							100	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		3.1.3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal    Orang	0	5	20.000.000	6	30.000.000							11	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		4.1.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu    %	100	100	25.000.000	100	60.000.000							100	85.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun    dokumen	5	10	25.000.000	10	60.000.000							20	85.000.000	DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya capaian kinerja Pemerintah Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor IKM Dinas Tenaga Kerja    Skor						80,8	3.641.983.467	81	3.791.983.467			81	7.433.966.934	DINAS TENAGA KERJA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu    dokumen						18	85.000.000	18	100.000.000			36	185.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu    dokumen						11	40.000.000	11	50.000.000			22	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu    dokumen						7	45.000.000	7	50.000.000			14	95.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan    laporan						26	2.521.983.467	64	2.526.983.467			90	5.048.966.934	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyusunan laporan gaji dan tunjangan ASN    laporan						26	2.521.983.467	26	2.521.983.467			52	5.043.966.934	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan    laporan						-	-	38	5.000.000			38	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    bulan</b>						12	402.300.000	12	437.300.000			24	839.600.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    bulan						12	30.000.000	12	40.000.000			24	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor    bulan						12	50.000.000	12	65.000.000			24	115.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga    bulan						12	40.000.000	12	50.000.000			24	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor    bulan						12	20.000.000	12	20.000.000			24	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan    bulan						12	20.000.000	12	20.000.000			24	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    bulan						12	10.000.000	12	10.000.000			24	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    bulan						12	232.300.000	12	232.300.000			24	464.600.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    bulan</b>						12	372.700.000	12	430.000.000			24	802.700.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    bulan						12	62.700.000	12	100.000.000			24	162.700.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor    bulan						12	30.000.000	12	30.000.000			24	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor    bulan						13	280.000.000	13	300.000.000			24	580.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>						12	260.000.000	12	297.700.000			24	557.700.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintahan Daerah    bulan</b>														
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    bulan						12	60.000.000	12	70.000.000			24	130.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    bulan						12	70.000.000	12	80.000.000			24	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya    paket						1	100.000.000	1	117.700.000			2	217.700.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    paket						1	30.000.000	1	30.000.000			2	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien</b>	<b>Meningkatnya capaian kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Skor IKM Dinas Tenaga Kerja    Skor</b>										<b>81,5</b>	<b>3.971.983.467</b>	<b>81,5</b>	<b>3.971.983.467</b>	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu    dokumen</b>										<b>18</b>	<b>110.000.000</b>	<b>18</b>	<b>110.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan										11	60.000.000	11	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah    dokumen														
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    laporan										7	50.000.000	7	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyusunan laporan keuangan    laporan</b>										<b>38</b>	<b>2.526.983.467</b>	<b>38</b>	<b>2.526.983.467</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    orang/bulan										22	2.521.983.467	22	2.521.983.467	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD    laporan										38	5.000.000	38	5.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    bulan</b>										<b>12</b>	<b>555.000.000</b>	<b>12</b>	<b>555.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    paket										1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    paket										4	75.000.000	4	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    paket										1	60.000.000	1	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    paket										2	25.000.000	2	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan										1	25.000.000	1	25.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				yang Disediakan    paket														
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    dokumen										12	10.000.000	12	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    laporan										12	310.000.000	12	310.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    bulan</b>										<b>12</b>	<b>470.000.000</b>	<b>36</b>	<b>470.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    laporan										12	120.000.000	12	120.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    laporan										12	40.000.000	12	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    laporan										12	310.000.000	12	310.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    bulan</b>										<b>12</b>	<b>310.000.000</b>	<b>12</b>	<b>310.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    unit										2	80.000.000	2	80.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    unit										11	90.000.000	11	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    unit										1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    unit										1	40.000.000	1	40.000.000	DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1.1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kompetensi    %	100	100	175.000.000	100	100.000.000							100	275.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	jumlah dokumen ketenagakerjaan daerah    dokumen	0	1	175.000.000	1	100.000.000							2	275.000.000	DINAS TENAGA KERJA
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu    %						100	100.000.000	100	150.000.000			100	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja    dokumen						1	100.000.000	3	150.000.000			4	250.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro    dokumen						1	100.000.000	1	100.000.000			2	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro    dokumen						-	-	2	50.000.000			2	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun tepat waktu    %										100	150.000.000	100	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja    dokumen										3	150.000.000	3	150.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro    dokumen										1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro    perusahaan										2	50.000.000	2	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1.1.4	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja</b>	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan    %	15	20	550.000.000	23	1.000.000.000							23	1.550.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.4.2	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja    Orang	180	140	550.000.000	180	1.000.000.000							320	1.550.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kompetensi    %	100	100	50.000.000	100	75.000.000							100	125.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.1.2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	jumlah lembaga pelatihan kerja (LPK) yang mendapat pembinaan    Lembaga	10	15	50.000.000	20	75.000.000							35	125.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.2	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan    %	0	20	30.000.000	21	1.420.000.000							21	1.450.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.2.2	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan    Kube	0	0	0	8	300.000.000							8	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		1.1.2.4	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas    Orang		50	30.000.000	50	80.000.000							100	110.000.000	
		1.1.2.5	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi    Orang		0	0	40	1.040.000.000							40	1.040.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	<b>Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi</b>		<b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/ kompetensi serta produktivitas kerja    %</b>						<b>100</b>	<b>2.675.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.875.000.000</b>			<b>100</b>	<b>5.550.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja    orang</b>						<b>240</b>	<b>2.040.000.000</b>	<b>280</b>	<b>2.240.000.000</b>			<b>520</b>	<b>4.280.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi    orang						240	1.890.000.000	280	2.090.000.000			520	3.980.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta    kali						12	50.000.000	12	50.000.000			24	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan peralatan pelatihan kerja    unit						10	100.000.000	10	100.000.000			20	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan    lembaga</b>						<b>20</b>	<b>100.000.000</b>	<b>28</b>	<b>100.000.000</b>			<b>48</b>	<b>200.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan    lembaga						20	100.000.000	28	100.000.000			48	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas    orang</b>						<b>150</b>	<b>535.000.000</b>	<b>150</b>	<b>535.000.000</b>			<b>300</b>	<b>1.070.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas    Orang						50	535.000.000	50	535.000.000			100	1.070.000.000	DINAS TENAGA KERJA
				Jumlah kelompok usaha bersama yang mendapat pelatihan kewirausahaan    orang						100		100				200	0	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	<b>Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan, memperoleh sertifikat/ kompetensi serta produktivitas kerja    %</b>										<b>100</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.720.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>jumlah peserta pelatihan yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja    orang</b>										<b>320</b>	<b>2.080.000.000</b>	<b>320</b>	<b>2.080.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n    orang										320	1.930.000.000	320	1.930.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas										10	50.000.000	10	50.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Lembaga Pelatihan Kerja	pada Tahun n    lembaga														
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja   unit										10	100.000.000	10	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Jumlah LPK yang mendapat Pembinaan</b>   lembaga										<b>28</b>	<b>100.000.000</b>	<b>28</b>	<b>100.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina   lembaga										28	100.000.000	28	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja   kegiatan</b>										<b>1</b>	<b>540.000.000</b>	<b>1</b>	<b>540.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah   dokumen										1	540.000.000	1	540.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan   %</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>130.000.000</b>	<b>21</b>	<b>250.000.000</b>							<b>21</b>	<b>380.000.000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
		1.1.2.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	jumlah dokumen penempatan tenaga kerja   dokumen	12	12	30.000.000	12	50.000.000							24	80.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.2.3	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja   Orang	3	160	100.000.000	400	200.000.000							560	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.4	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan   %</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>400.000.000</b>	<b>23</b>	<b>500.000.000</b>							<b>23</b>	<b>900.000.000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		1.1.4.1	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair)    Orang	0	1500	400.000.000	1500	500.000.000							3000	900.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.3	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan    %</b>	100	100	30.000.000	100	40.000.000							100	70.000.000	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
		1.1.3.1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan pekerja migran indonesia (PMI) yang tertangani    %	100	100	30.000.000	100	40.000.000							100	70.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</b>		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja    %</b>						100	750.000.000	100	1.530.000.000			100	2.280.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelayanan antar kerja   bulan</b>						12	225.000.000	12	250.000.000			24	475.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja    orang						2300	135.000.000	2400	154.000.000			4700	289.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	jumlah peserta sosialisasi penempatan tenaga kerja   orang						200	90.000.000	250	96.000.000			450	186.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja   bulan</b>						12	480.000.000	12	495.000.000			24	975.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penyediaan jasa internet   bulan						12	10.000.000	0				12	10.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah dokumen penempatan tenaga kerja   dokumen						12	50.000.000	12	75.000.000			24	125.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penyelenggaraan Job Fair    orang						850	420.000.000	1350	420.000.000			2200	840.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI    orang						10	45.000.000	90	785.000.000			100	830.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertangani    orang						10		10				20		DINAS TENAGA KERJA
				Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan dan uji kompetensi    orang						0	45.000.000	80	785.000.000			80	830.000.000	DINAS TENAGA KERJA
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase pencari kerja yang mendapat fasilitas penempatan kerja    %</b>										<b>100</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.530.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja    bulan										<b>12</b>	<b>250.000.000</b>	<b>12</b>	<b>250.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL    orang										750	154.000.000	7100	154.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan    orang										250	96.000.000	700	96.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penyediaan lowongan informasi pasar kerja    bulan										<b>12</b>	<b>495.000.000</b>	<b>12</b>	<b>495.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online     dokumen										0		0		DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)     orang										1500	75.000.000	1500	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja     orang										1000	420.000.000	1000	420.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah CPMI yang mendapat pelatihan, uji kompetensi dan penanganan kasus PMI     orang</b>										<b>10</b>	<b>785.000.000</b>	<b>10</b>	<b>785.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya     orang										10	785.000.000	10	785.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</b>	<b>1.1.3</b>	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan     %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000</b>							<b>100</b>	<b>550.000.000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
		1.1.3.2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan     Orang	1	90	75.000.000	150	90.000.000							240	165.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.3.3	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh internasional     kali	0	1	125.000.000	1	150.000.000							2	275.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.1.3.4	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah perusahaan pergerah tenaga kerja yang dibina     Perusahaan	0	3	25.000.000	3	30.000.000							6	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		1.1.3.5	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Presentase kasus hubungan industrial yang tertangani    %	100	100	25.000.000	100	30.000.000							100	55.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha		<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan   %</b>						100	350.000.000	100	365.000.000			100	715.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan   orang</b>						150	90.000.000	150	100.000.000			300	190.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan   orang						150	90.000.000	150	100.000.000			300	190.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama   kasus</b>						6	260.000.000	6	265.000.000			12	525.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang terdata dan mendapatkan sosialisasi sarana hubungan industrial   perusahaan						60	30.000.000	65	30.000.000			125	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama    kasus						6	30.000.000	6	35.000.000			12	65.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh internasional   kali						1	200.000.000	1	200.000.000			2	400.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan   %</b>										<b>100</b>	<b>365.000.000</b>	<b>100</b>	<b>365.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan   orang</b>										<b>150</b>	<b>100.000.000</b>	<b>150</b>	<b>100.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan   laporan										1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah penyelesaian hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama   perkara</b>										<b>6</b>	<b>265.000.000</b>	<b>6</b>	<b>265.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah    perkara										60	30.000.000	60	30.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan    perkara										6	35.000.000	6	35.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina    lembaga										1	200.000.000	1	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Program pengembangan wilayah transmigrasi</b>	<b>persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih    %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>280.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.250.000.000</b>							<b>100</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>
		1.2.1.1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan    dokumen	1	2	50.000.000	2	800.000.000							4	850.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.2.1.2	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi    Orang	50	50	40.000.000	50	50.000.000							100	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
		1.2.1.3	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	jumlah calon transmigran yang terseleksi dan mendapat pelatihan    KK	1	10	40.000.000	10	50.000.000							20	90.000.000	DINAS TENAGA KERJA
		1.2.1.4	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan    KK	5	10	150.000.000	10	350.000.000							20	500.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja</b>	<b>Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan</b>		<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih    %</b>						<b>100</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>100</b>	<b>585.000.000</b>			<b>100</b>	<b>1.855.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan    KK</b>						<b>10</b>	<b>1.270.000.000</b>	<b>10</b>	<b>585.000.000</b>			<b>20</b>	<b>1.855.000.000</b>	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan pemkab magetan    dokumen						2	800.000.000	2	100.000.000			4	900.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan    KK						10	350.000.000	10	350.000.000			20	700.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyuluhan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi    Orang						50	60.000.000	50	60.000.000			100	120.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelatihan Transmigrasi	jumlah calon transmigran yang terseleksi, dan mendapat pelatihan    KK						10	60.000.000	10	75.000.000			20	135.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
Meningkatkan penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih   %										100	585.000.000	100	585.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon transmigran yang terseleksi, mendapat pelatihan dan diberangkatkan   KK										5	585.000.000	5	585.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    laporan										1	100.000.000	1	100.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan   KK										5	350.000.000	5	350.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan    KK										25	60.000.000	25	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan   orang										5	75.000.000	5	75.000.000	DINAS TENAGA KERJA
<b>TOTAL</b>							<b>2.650.000.000</b>		<b>5.920.000.000</b>		<b>8.786.983.467</b>		<b>9.296.983.467</b>		<b>9.321.983.467</b>		<b>35.975.950.401</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Samodra No. 98 Telp & Fax. (0351) 894521 Magetan – 63315  
Email : [disnaker@magetan.go.id](mailto:disnaker@magetan.go.id)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M. Si**  
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magetan, Oktober 2022

Bupati Magetan  
  


**Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si**

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Magetan  
  


**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196305101990111001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : DINAS TENAGA KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	3	4
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	%	100
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	5
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	64
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	Skor	81

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.439.065.801,-	DAU, DBH PUSAT, DBH PROVINSI
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	82.719.970,-	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.096.208.757,-	DBHCHT, LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	102.979.825,-	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
5	Program Hubungan Industrial	113.737.400,-	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	160.000.000,-	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
<b>TOTAL</b>		<b>4.994.711.753,-</b>	



Bupati Magetan

**Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si**



Magetan, Oktober 2022  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja  
 Kabupaten Magetan

**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
 NIP. 196305101990111001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	100
2	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100	100	100
3	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	5	5	100
4	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	64	67,46	105,41
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	81	89,21	110,13